



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**NOTA PENGANTAR
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SERTA PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

SENIN, 15 JULI 2024

=====

ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

- YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA OPD/ BIRO/
RSD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

**ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN. PUJI DAN SYUKUR KEPADA
ALLAH SWT, ATAS KARUNIA DAN KEBERKAHAN DARINYA PADA HARI
INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
RANGKA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUPA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2024.**

SHALAWAT DAN SALAM KITA MOHONKAN JUGA KEPADA ALLAH SAW AGAR DILIMPAHKAN BAGI JUNJUNGAN KITA YANG MULIA NABI MUHAMMAD SAW. SEMOGA KITA BERSAMA DAPAT MENTAULADANINYA DALAM PEMIKIRAN, PERKATAAN, DAN PERBUATAN SEHINGGA KITA DAPAT MEMPEROLEH KEBAHAGIAN DI DUNIA DAN AKHIRAT.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

MERUJUK KEPADA DATA DAN INFORMASI YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SUMATERA BARAT, PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT TRIWULAN I-2024 YANG DIHITUNG BERDASARKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENCAPI RP.80,65 TRILIUN ATAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENCAPI RP.48,70 TRILIUN. EKONOMI SUMATERA BARAT TRIWULAN I-2024 TERHADAP PERIODE YANG SAMA DI TAHUN SEBELUMNYA TUMBUH SEBESAR 4,37 PERSEN (Y-ON-Y). DARI SISI PRODUKSI, LAPANGAN USAHA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB MENGALAMI PERTUMBUHAN TERTINGGI SEBESAR 9,88 PERSEN. SEMENTARA DARI SISI PENGELUARAN PERTUMBUHAN TERTINGGI DICAPAI OLEH KOMPONEN PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT) SEBESAR 20,56 PERSEN. EKONOMI SUMATERA BARAT TRIWULAN I-2024 TERHADAP TRIWULAN SEBELUMNYA MENGALAMI KONTRAKSI ATAU PENURUNAN SEBESAR 0,63 PERSEN (Q-TO-Q). DARI SISI PRODUKSI, LAPANGAN USAHA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB MENGALAMI PERTUMBUHAN TERTINGGI SEBESAR 11,49 PERSEN. SEMENTARA DARI SISI PENGELUARAN, KOMPONEN

PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (PK-P) MENGALAMI KONTRAKSI TERDALAM SEBESAR 37,46 PERSEN.

PADA MEI 2024 TERJADI INFLASI YEAR ON YEAR (Y-ON-Y) SEBESAR 4,17 PERSEN DENGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) SEBESAR 107,77. INFLASI TERTINGGI TERJADI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT SEBESAR 5,93 PERSEN DENGAN IHK SEBESAR 108,98 DAN TERENDAH TERJADI DI KOTA PADANG SEBESAR 3,64 PERSEN DENGAN IHK SEBESAR 107,35.

NILAI TUKAR PETANI (NTP) SUMATERA BARAT MEI 2024 SEBESAR 123,72 ATAU NAIK 1,87 PERSEN DIBANDING NTP BULAN SEBELUMNYA. PENINGKATAN NTP DIKARENAKAN PENINGKATAN INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI (IT) NAIK SEBESAR 2,15 PERSEN DAN INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI (IB) SEBESAR 0,27 PERSEN. NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN (NTUP) SUMATERA BARAT APRIL 2024 126,99 ATAU NAIK 2,27 PERSEN DIBANDING NTUP BULAN SEBELUMNYA. PADA MEI 2024 NTP MASING-MASING SUBSEKTOR TERCATAT SEBESAR 103,96 UNTUK SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN (NTPP), 133,90 UNTUK SUBSEKTOR HORTIKULTURA (NTPH), 149,34 UNTUK SUBSEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT (NTPR), 110,55 UNTUK SUBSEKTOR PETERNAKAN (NTPT), DAN 92,01 UNTUK SUBSEKTOR PERIKANAN (NTPN). SUBSEKTOR PERIKANAN TERBAGI MENJADI DUA, YAITU SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN NTP MASING-MASING SEBESAR 93,73 DAN 90,70.

KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE SUMATERA BARAT PADA APRIL 2024 MELALUI PINTU MASUK BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU SEBANYAK 7.166 KUNJUNGAN, MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 140,79 PERSEN DIBANDINGKAN BULAN SEBELUMNYA. TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BERBINTANG DI SUMATERA BARAT APRIL 2024 ADALAH

SEBESAR 41,38 PERSEN, MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR 7,54 POIN DIBANDINGKAN TPK BULAN SEBELUMNYA. TPK HOTEL NONBINTANG DI SUMATERA BARAT PADA APRIL 2024 ADALAH SEBESAR 23,63 PERSEN, MENINGKAT 8,74 POIN DIBANDINGKAN TPK BULAN SEBELUMNYA. RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU DI HOTEL BERBINTANG PADA APRIL 2024 TERCATAT SEBESAR 1,18 HARI, TURUN 0,10 HARI DIBANDINGKAN BULAN SEBELUMNYA.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI SUMATERA BARAT BULAN FEBRUARI 2024 SEBESAR 5,79 PERSEN, MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 0,11 PERSEN POIN DIBANDINGKAN FEBRUARI 2023. BULAN FEBRUARI 2024, JUMLAH ANGKATAN KERJA DI SUMATERA BARAT SEBANYAK 3,09 JUTA ORANG, MENINGKAT 86,78 RIBU ORANG DIBANDING FEBRUARI 2023, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) JUGA MENGALAMI KENAIKAN 0,48 PERSEN POIN. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) FEBRUARI 2024 SEBESAR 5,79 PERSEN, TURUN SEBESAR 0,11 PERSEN POIN DIBANDINGKAN DENGAN FEBRUARI 2023. PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI SUMATERA BARAT SEBANYAK 2,91 JUTA ORANG, NAIK 84,91 RIBU ORANG DIBANDINGKAN FEBRUARI 2023 (2,82 JUTA ORANG). LAPANGAN PEKERJAAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN TERBESAR PENYERAPAN TENAGA KERJA ADALAH SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (2,97 PERSEN POIN), DIKUTI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (0,91 PERSEN POIN). SEBANYAK 1,85 JUTA ORANG (63,76 PERSEN) BEKERJA PADA KEGIATAN INFORMAL, NAIK 3,92 PERSEN POIN DIBANDING FEBRUARI 2023. PERSENTASE SETENGAH PENGANGGUR DI PROVINSI SUMATERA BARAT NAIK SEBESAR 2,40 PERSEN POIN, SEMENTARA PERSENTASE PEKERJA PARUH WAKTU MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 1,87 PERSEN POIN DIBANDINGKAN FEBRUARI 2023.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DARI TAHUN KE TAHUN TERUS MENGUPAYAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN. DALAM RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024, TELAH DITETAPKAN TARGET TINGKAT KEMISKINAN UNTUK TAHUN 2024 ADALAH 5,62%. BERBAGAI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI YANG DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MEMBUAT JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERUS BERKURANG HINGGA MENJADI 343,82 RIBU JIWA PADA BULAN SEPTEMBER 2022 DAN MENJADI 340,37 RIBU JIWA PADA BULAN MARET TAHUN 2023. ANGKA INI DIPREDIKSI AKAN TERUS MEMBAIK SEIRING DENGAN KEMBALI PULIHNYA BEBERAPA LAPANGAN USAHA AKIBAT PANDEMI. PERBAIKAN INI DIPREDIKSI CENDERUNG LEBIH LAMBAT DARI PADA TARGET AWAL DALAM RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024, SEHINGGA ANGKA 5,62% HARUS TERKOREKSI MENJADI 5,45% - 5,85% BERDASARKAN HASIL ANALISIS PEMERINTAH DAERAH.

BERDASARKAN PERKEMBANGAN CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGAT KEMISKINAN TRIWULAN II TAHUN 2024 YANG TELAH DIRILIS OLEH BPS PROVINSI SUMATERA BARAT, DIMANA TERDAPAT PENYESUAIAN PROYEKSI TARGET UNTUK KETIGA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TERSEBUT UNTUK TAHUN 2024 JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PADA RKPD TAHUN 2024, YAKNI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN PERKEMBANGAN SEBAGAIMANA YANG DIKEMUKAKAN TADI, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT JUGA SUDAH MENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKPD) TAHUN 2024. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 TERSEBUT MENJADI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN KUPA-PPAS TAHUN 2024. DISAMPING PERUBAHAN DALAM ASUMSI PEREKONOMIAN, PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT JUGA DIDASARI OLEH KEADAAN AKTUAL YANG TELAH TERJADI SEJAK AWAL TAHUN SAMPAI DENGAN AKHIR SEMESTER PERTAMA DI DALAM TAHUN ANGGARAN 2024 INI. KEADAAN AKTUAL YANG TELAH TERJADI TERSEBUT MULAI DARI TERJADINYA BENCANA ALAM SAMPAI DENGAN TERDAPATNYA HAL YANG BERSIFAT PENGATURAN DARI PEMERINTAH PUSAT, DINAMIKA ADMINISTRASI, DAN HASIL AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2023 YANG TELAH SAMA-SAMA KITA IKUTI PADA BEBERAPA WAKTU KE BELAKANG.

SECARA RINGKAS BERIKUT 5 (LIMA) KELOMPOK KONDISI YANG MENGAKIBATKAN PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2024, YAITU:

- A. PERUBAHAN YANG TERJADI PADA ASUMSI YANG SEBELUMNYA DIJADIKAN DASAR DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2024.

PADA BAGAIAN AWAL TADI, KITA TELAH MENGELABORASI HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT. TENTU KITA PERLU MENYESUAIKAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN MENYIKAPI HAL-HAL YANG TELAH TERJADI DALAM SEMESTER PERTAMA TAHUN 2024 SERTA HARAPAN DALAM SEMESTER KEDUA YANG AKAN KITA LALUI.

- B. KEKURANGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIJADIKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024, SEBAGAIMANA

HASIL AUDIT BPK.

DARI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 TANGGAL 17 MEI 2024, SILPA TAHUN ANGGARAN 2023 ADALAH SEBESAR RP.180.447.544.425,19. SEDANGKAN DALAM APBD TA 2024 SILPA TA 2023 DIHARAPKAN SEBESAR RP.251.444.175.049, SEHINGGA TERDAPAT KEKURANGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBANYAK RP.70.996.630.623,81

C. TERJADINYA BENCANA ALAM YANG MEMBUTUHKAN PROSES TANGGAP DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.

DALAM SEMESTER I TAHUN 2024 TERDAPAT BEBERAPA BENCANA ALAM YANG MEMBUTUHKAN PROSES TANGGAP DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI, DIANTARANYA:

1. ERUPSI GUNUNG MARAPI SEJAK AKHIR TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN BULAN-BULAN DALAM SEMESTER I TAHUN 2024.
2. LONGSOR DAN RUSAKNYA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (TPA) REGIONAL DI PAYAKUMBUH YANG BERDAMPAK PADA KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SERTA SEKTOR LAINNYA SEPERTI PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN.
3. BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN LONGSOR PADA 7-8 MARET 2024 YANG TERJADI PADA BEBERAPA KABUPATEN/ KOTA, DENGAN LOKASI DAMPAK TERPARAH DI PESISIR SELATAN.
4. BANJIR BANDANG DAN BANJIR LAHAR DINGIN GUNUNG MARAPI PADA 11 MEI 2024.

BENCANA-BENCANA ALAM SEBAGAIMANA DIATAS TELAH MERENGGUT KORBAN JIWA DARI SANAK SAUDARA KITA. DISAMPING ITU JUGA MENYEBABKAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN UMUM, SEPERTI JALAN, JEMBATAN, DAN JARINGAN IRIGASI.

- D. ADANYA PENGATURAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG MEMERLUKAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN SERTA ADANYA KEBUTUHAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN OPD.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TELAH MENGELUARKAN 2 (DUA) PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT UNTUK MENAKOMODASI PENGATURAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG MEMERLUKAN PERGESERAN ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN OPD UNTUK PERGESERAN ANGGARAN.

1. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, YANG MENAKOMODIR PERGESERAN ANGGARAN YANG DISEBABKAN OLEH:

- A) BELUM SESUAINYA PENGANGGARAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/ *SPECIFIC GRANT* (DAU SG) SEBAGAIMANA AMANAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.07/2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2024.

- B) TINDAK LANJUT ATAS SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5/20741/KEUDA TENTANG HASIL PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DBH-DR, DBH-CHT, DBH-SAWIT, DBH-MIGAS OTSUS, SERTA TDF.
 - C) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024.
 - D) USULAN PERGESERAN ANGGARAN DARI BEBERAPA OPD SEBAGAIMANA SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 904.1.2.4/70A/APKD/BPKAD/2024 TENTANG USULAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN 2024.
2. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, YANG MENGAKOMODIR PERGESERAN ANGGARAN YANG DISEBABKAN OLEH:
- A) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.
 - B) SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 900.1/1819.A/SJ PERIHAL HASIL PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

KEUANGAN DAERAH TERKAIT DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2024.

- C) LAPORAN HASIL REVIU INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TERKAIT DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- E. KEWAJIBAN UNTUK MENGGANGGARKAN KEMBALI SISA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BAIK FISIK MAUPUN NON FISIK SERTA SISA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DARI KABUPATEN/ KOTA YANG BELUM DIREALISIR PADA TAHUN SEBELUMNYA.
- F. PENURUNAN BELANJA PEGAWAI BERDASARKAN DINAMIKA JUMLAH PEGAWAI, REALISASI AKTUAL, DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024.
- G. PERLUNYA DIALOKASIKAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MEMBAYAR KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK KEPADA KABUPATEN/ KOTA.

MERUJUK KEPADA SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, NOMOR: 971.1/04/PPD-BAPENDA/2024, TANGGAL 30 JANUARI 2024 TANTANG PENETAPAN KEKURANGAN SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI SUMATERA BARAT BAGIAN KABUPATEN/ KOTA SE SUMATERA BARAT, MASIH TERDAPAT KURANG SALUR DBH PAJAK KEPADA KABUPATEN/ KOTA SEBESAR RP.317.299.222.238, YANG TERDIRI DARI 4 (EMPAT) JENIS PAJAK PROVINSI, YAITU: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB); BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB); PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB); DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP).

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT TENTU DALAM TAHUN ANGGARAN 2024 INI MELALUI PERUBAHAN ANGGARAN PERLU DIALOKASIKAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MEMBAYAR KURANG SALUR DBH PAJAK DIMAKSUD.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERIKUT DIURAIKAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI BERIKUT.

A. PENDAPATAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2024 DI SISI PENDAPATAN DAERAH BERUPA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG DAPAT MEMBIAYAI KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA DALAM PERUBAHAN APBD TA 2024.

DALAM RANGKA OPTIMALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH, KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI ADALAH PENERAPAN STRATEGI-STRATEGI YANG DITUANGKAN KE DALAM LANGKAH YANG KONKRET, YANG AKUNTABEL, SINERGI, KOORDINATIF, MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI TERBARUKAN, DAN EFEKTIF DALAM PELAKSANAAN DENGAN MENERAPKAN BEBERAPA STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH, YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

1. MENGOPTIMALKAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGKAL SATU ATAP (SAMSAT) MELALUI:

- A) MENGEMBANGKAN PELAKSANAAN *PAYMENT POINT SYSTEM* BEKERJASAMA DENGAN BANK NAGARI, DAN BANK PEMERINTAH LAINNYA PADA SELURUH KANTOR SAMSAT DI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA**

PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK;

- B) MENGOPERASIKAN KANTOR SAMSAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DAN KANTOR-KANTOR SAMSAT NAGARI DI SELURUH KABUPATEN YANG MEMPUNYAI WILAYAH JAUH DALAM RANGKA MENDEKATKAN PELAYANAN KEPADA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR ATAU WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYARKAN PAJAKNYA.**
- C) MELAKUKAN PEMBEBASAN DENDA PKB/ BBNKB UNTUK PERIODE WAKTU TERTENTU.**
- D) INOVASI "SI BIJAK", YAITU ISI MINYAK BAYAR PAJAK DAN CICILAN PAJAK.**
- E) OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR SEPERTI SAMSAT KELILING, SAMSAT DRIVE THRU, SAMSAT NAGARI, SAMSAT GERAJ, SAMSAT MALAM, SAMSAT CAR FREE DAY, SAMSAT WISATA, SAMSAT TERMINAL DALAM RANGKA MENDEKATKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT.**
- F) MELAKUKAN PEMBEBASAN BBNKB II BAGI KENDARAAN BERMOTOR LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PERIODE WAKTU TERTENTU.**
- G) MELAKSANAKAN RAZIA TERPADU PKB/ BBNKB SECARA RUTIN DAN BERKESINAM-BUNGAN.**
- H) MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SUMATERA BARAT YANG TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAERAH, DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMATERA BARAT DAN PT. JASA RAHARJA DAN MELIBATKAN PT. BANK NAGARI, DALAM RANGKA KELANCARAN URUSAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PADA SELURUH KANTOR SAMSAT SE-**

PROVINSI SUMATERA BARAT.

- I) MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR UPT/ SAMSAT DENGAN MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KANTOR UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT SECARA BERKALA DAN BERTAHAP DAN MELENGKAPI SELURUH PERALATAN SISTEM PELAYANAN BAIK PELAYANAN ONLINE MAUPUN PELAYANAN YANG DILAKUKAN SECARA OFFLINE.
- J) MELAKUKAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PETUGAS TERKAIT TENTANG TUGAS PELAYANAN DI LAPANGAN.
- K) MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SECARA RUTIN DAN LANGSUNG TERHADAP SEMUA TUGAS PADA SEMUA UPT.
- L) MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA INVENTARISASI ASET KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI OBJEK PAJAK.
- M) MENINGKATKAN KUALITAS PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI STATUS OBJEK PAJAK.
- N) MELAKSANAKAN EVALUASI SECARA BERKALA ATAS PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS SELURUH KEPALA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
- O) SOSIALISASI SECARA MASIF TERKAIT PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT SELAKU WAJIB PAJAK DAN STAKEHOLDER TERKAIT.

2. MELAKUKAN PENDATAAN POTENSI, EVALUASI PENERIMAAN DAN MELAKUKAN KAJIAN DALAM UPAYA MEMPREDIKSI KONDISI EKONOMI TAHUN BERIKUTNYA UNTUK MENGHITUNG PENETAPAN TARGET APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
3. MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM, JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU DENGAN MENGIMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI PADA SELURUH OPD DINAS/ INSTANSI PENGELOLA PELAYANAN RETRIBUSI SERTA MENJARING POTENSI-POTENSI BARU YANG SELAMA INI BELUM TERPUNGUT.
4. MENINGKATKAN KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR OPD DINAS/ INSTANSI PELAYANAN RETRIBUSI DENGAN MELENGKAPI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN, MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN BERBAIKAN KANTOR SECARA BERKALA, DAN BERTAHAP DAN MELENGKAPI SELURUH PERALATAN SISTEM PELAYANAN.
5. MENINGKATKAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA SEMUA BUMD SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PENINGKATAN JUMLAH DEVIDEN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
6. MENGOPTIMALKAN ASET-ASET PEMERINTAH DAERAH YG MASIH *IDLE* DAN BERPOTENSI SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DENGAN CARA KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN PIHAK LAIN SEHINGGA MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.
7. MENINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN SELURUH OPD DINAS/ INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERUTAMA OPD DINAS/ INSTANSI PENGELOLA BLUD, PENGELOLA KEUANGAN DAN KAS DAERAH, PENGELOLA PELAYANAN

PERSAMPAHAN, PENGELOLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGELOLA PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAN LAIN-LAIN SEHINGGA DAPAT MENINGKATAN PENERIMAAN DAN BERKONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

8. MENINGKATKAN KOORDINASI, KONFIRMASI DAN REKONSILIASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DARI DANA BAGI HASIL; DAN
9. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KONFIRMASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PIHAK SWASTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DID, IPDMIP, PHJD, HIBAH DAN LAINNYA SERTA SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

PENDAPATAN DAERAH DITARGETKAN SEBANYAK RP.6.58 TRILIUN LEBIH, BERTAMBAH MINIMAL SEBANYAK RP.2,25 MILYAR LEBIH DENGAN RINCIAN:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITARGETKAN MINIMAL SEBESAR RP.3,11 TRILIYUN LEBIH YANG TERDIRI DARI:
 - A) PENDAPATAN DARI PAJAK DAERAH SEBESAR RP.2,55 TRILIYUN LEBIH,
 - B) PENDAPATAN DARI RETRIBUSI DAERAH SEBESAR RP.384,29 MILIYAR LEBIH,
 - C) PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SEBESAR RP.125,49 MILIYAR LEBIH; DAN
 - D) PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SEBESAR RP.54,11 MILIYAR LEBIH.

2. PENDAPATAN TRANSFER SEBESAR RP.3,453 TRILIYUN LEBIH, NAIK SEBANYAK RP.2,25 MILIYAR DARI APBD 2024 AWAL SEBANYAK RP.3,451 TRILIYUN LEBIH.

PENAMBAHAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER BERASASAL DARI TRANSFER ANTAR DAERAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROVINSI KEPRI, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN KARIMUN, DENGAN TOTAL SEBANYAK RP2,25 MILIYAR YANG DISETORKAN SEBAGAI BANTUAN BENCANA ALAM YANG MELANDA PROVINSI SUMATERA BARAT.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SEBESAR RP.17,02 MILYAR LEBIH

B. BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TA 2024 DI SISI BELANJA DAERAH ADALAH PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA UNTUK MENYIKAPI PERUBAHAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN SEBELUMNYA.

DALAM PENCAPAIAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAKA STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 DILAKUKAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT:

1. MENITIKBERATKAN PADA PENCAPAIAN VISI DAN MISI PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026.

2. PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DIPRIORITASKAN UNTUK Mendukung ketercapaian target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) pada masing-masing urusan, indikator kinerja program, serta indikator kinerja program unggulan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026
3. Mendorong kegiatan bersifat strategis dan/ atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

BELANJA DAERAH DIRENCANAKAN SEBANYAK RP.7,03 TRILIUN LEBIH, DENGAN KEBIJAKAN:

1. PENGALOKASI ANGGARAN BELANJA UNTUK PROSES RECOVERI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM YANG RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM.
2. TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2023, DIANTARANYA BERUPA: PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK:

A) SISA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) YANG HARUS DIANGGARKAN KEMABLI PADA PERUBAHAN APBD TA. 2024, YANG TERDIRI DARI:

- SISA DAK FISIK SEBESAR RP.23,97 MILYAR LEBIH
- SISA DAK NON FISIK SEBESAR RP.2,10 MILIYAR LEBIH

B) HUTANG BELANJA TAHUN 2023 DARI BEBERAPA SKPD YANG HARUS DIANGGARKAN KEMBALI DI TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH SEBESAR RP.5,23 MILIYAR LEBIH.

C) KEGIATAN FISIK YANG Pengerjaannya melewati tahun 2023 dengan jumlah sebesar RP.18,27 MILIYAR LEBIH.

D) SISA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DARI KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2023 UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI YANG HARUS DISALURKAN SEBESAR RP.2,56 MILIYAR LEBIH.

3. PENGURANGAN ALOKASI BELANJA PEGAWAI SEBAGAI AKIBAT DARI DINAMIKA JUMLAH PEGAWAI, PENYESUAIAN DENGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI, PEMBERLAKUAN PP NOMOR 14 TAHUN 2024, SEHINGGA ALOKASINYA PERLU DIKURANGI PADA BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN SEBESAR RP.47,79 MILIYAR LEBIH DAN PADA BELANJA TPP SEBESAR RP.8,43 MILIYAR LEBIH.

4. PENYESUAIAN BELANJA DENGAN PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA UNTUK TAHUN 2024 PADA SIPD, DAN PENYESUAIAN DENGAN PENERAPAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ATAS PENGADAAN BARANG BAIK BARANG PAKAI HABIS MAUPUN BELANJA MODAL.

5. PENYESUAIAN UNTUK PERGESERAN BELANJA PADA BEBERAPA KEGIATAN TERKAIT BELANJA HIBAH PADA BEBERAPA SKPD SESUAI KEWENANGANNYA.
6. PENYESUAIAN PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA, OBJEK BELANJA, DAN RINCIAN OBJEK BELANJA, BAIK YANG TELAH DILAKUKAN PERGESERAN BELANJA MELALUI PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR, MAUPUN YANG HARUS MELALUI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH.
7. PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PEMBAYARAN KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK KE PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SEBESAR RP.150 MILYAR DARI TOTAL KURANG SALUR SEBANYAK RP.317,29 MILYAR LEBIH. ADAPUN SISANYA DIUSULKAN UNTUK DIANGGARKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA.

DENGAN DEMIKIAN BELANJA DAERAH YANG SEMULA DIALOKASIKAN PADA APBD TAHUN 2024 SEBESAR RP6,81 TRILIYUN LEBIH DIRANCANG MENJADI SEBESAR RP.7,03 TRILIYUN LEBIH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 ATAU BERTAMBAH SEBESAR RP.219,29 MILYAR LEBIH YANG TERDIRI DARI BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA, DENGAN URAIKAN SEBAGAI BERIKUT.

1. BELANJA OPERASI

PADA APBD AWAL TAHUN ANGGARAN 2024 DIANGGARKAN BELANJA OPERASI SEBESAR RP4,68 TRILIYUN LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD DIRENCANAKAN SEBESAR RP.4,75 TRILIYUN LEBIH, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR RP.66,47 MILYAR LEBIH ATAU 1.42%

2. BELANJA MODAL

BELANJA MODAL PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 AWAL ADALAH SEBESAR RP.782,79 MILIYAR LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD DIPERKIRAKAN SEBESAR RP.807,17 MILIYAR LEBIH, NAIK SEBESAR RP.24,77 MILIYAR LEBIH ATAU 3.11%

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

PADA APBD TAHUN 2024 DIALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR RP.46.94 MILIYAR LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD MENJADI SEBESAR RP.25,38 MILIYAR LEBIH ATAU BERKURANG SEBESAR RP.21,55 MILIYAR LEBIH.

4. BELANJA TRANSFER

BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2024 ADALAH SEBESAR RP.1,30 TRILIYUN LEBIH DAN PADA PERUBAHAN APBD MENJADI SEBESAR RP.1,45 TRILIYUN LEBIH, NAIK SEBESAR RP.150 MILIYAR ATAU 10.33%.

C. PEMBIAYAAN

UNTUK KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 AWAL BERASAL DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR RP.251,44 MILIYAR LEBIH. SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN SUMATERA BARAT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

NOMOR 47.B/LHP/ XVIII.PDG/05/2024 TANGGAL 17 MEI 2024
DITETAPKAN SILPA TAHUN 2023 ADALAH SEBESAR RP.180,44
MILIYAR LEBIH ATAU KURANG SEBANYAK RP. 70,99 MILYAR LEBIH
DENGAN ADANYA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN
2023 AUDITED TERSEBUT, MAKA ANGGARAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN TAHUN 2024 HARUS DILAKUKAN PENYESUAIAN
PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENJADI SEBESAR
RP.180.447.544.425 TERSEBUT.
PADA BAGIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TIDAK MENGALAMI
PERUBAHAN ANGGARAN.

**SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI
HORMATI.**

MEMENUHI AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENYUSUN RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) SERTA PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN
2024.

KAMI MENYADARI, BAHWA KUPA DAN PPAS TAHUN 2024 YANG
KAMI SUSUN INI BELUMLAH SEPENUHNYA MENJAWAB SELURUH
USULAN DAN ASPIRASI YANG BERKEMBANG DI TENGAH
MASYARAKAT, NAMUN DENGAN MEMPERHATIKAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DAN
KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MAKA PENYUSUNAN RANCANGAN
KUPA DAN PPAS TAHUN 2024 TETAP DIUPAYAKAN SEMAKSIMAL DAN
DIHARAPKAN DAPAT MENGAKOMUDIR ASPIRASI MASYARAKAT.

ADAPUN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PPAS TAHUN 2024, SECARA TEKNIS TETAP MENGACU PADA KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA MEMPEDOMANI REGULASI TERKAIT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).

DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD INI, TERDAPAT HAL-HAL YANG PERLU DISEPAKATI ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH, YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

1. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024;
2. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH;
3. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH; DAN
4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH;

SELANJUTNYA, RANCANGAN KUPA-PPAS INI AKAN DILANJUTKAN DENGAN PROSES PEMBAHASAN GUNA MEMPEROLEH KESEPAKATAN BERSAMA DAN MENJADI KUPA-PPAS TA 2024. KEMUDIAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DEMIKIANLAH NOTA PENGANTAR KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA PERUBAHAN PPAS INI KAMI SAMPAIKAN. TERIMA KASIH ATAS WAKTU YANG DIBERIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI. MOHON MAAF APABILA ADA YANG TIDAK PADA TEMPATNYA.

WABILLAHITAUFIQWALHIDAYAH.

WASSALAMU'ÁLAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUHU.
PERUBAHAN

PADANG, 15 JULI 2014

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

AUDY JOINALY



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PENGANTAR RANPERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024
RABU, 31 JULI 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sore hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada sore hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2024, dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelum kita masuk pada agenda Rapat Paripurna ini terlebih dahulu kami sampaikan, bahwa sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, pada hari ini terdapat 2 (dua) agenda rapat paripurna, yaitu penetapan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah dan penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Berhubung belum diterimanya hasil fasilitasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, maka pengambilan keputusannya belum dapat kita lakukan pada rapat paripurna ini dan akan diagendakan kembali setelah diterimanya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada rapat paripurna hari ini, hanya ada 1 (satu) agenda saja yaitu Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam rangka menyikapi perubahan asumsi KUA serta kondisi lainnya yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan APBD, pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 27 Juli 2024 yang lalu, Gubernur dan DPRD telah menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 177 dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan September dan Keputusan bersama antara antara Kepala Daerah dan DPRD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran atau tepatnya tanggal 30 September.

Dalam hal, Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil Keputusan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah melakukan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan atau dalam arti kata tidak ada Perubahan APBD.

Berhubung masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024 dan Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2024-2029 belum bisa efektif melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya alat kelengkapan DPRD dan ditetapkannya Pimpinan DPRD definitif, maka untuk

menghindari keterlambatan dalam penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang berakibat tidak bisa dilakukannya Perubahan APBD, maka penyampaian, pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, perlu dilakukan percepatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan agenda kegiatan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah, maka pada Rapat Paripurna Dewan hari ini, Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

Sebelum Saudara Gubernur menyampaikan Nota Pengantarnya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut yang perlu menjadi perhatian nanti dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang disepakati tersebut, sifatnya masih tentatif. Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- dan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,- yang disepakati,

angkanya masih bersifat sementara atau imajiner dalam Upaya menyeimbangkan neraca pendapatan dan belanja dari Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024.

2. Memperhatikan kondisi Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, maka Pemerintah Daerah dan TAPD harus lebih cermat dalam perencanaan anggaran yang akan diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Permasalahan yang terjadi dalam perencanaan Perubahan APBD Tahun 2023 yang berdampak tidak tercapainya proyeksi SILPA untuk menutup defisit APBD Tahun 2024, jangan terulang kembali. Apabila permasalahan yang sama terulang kembali, maka akan berdampak nanti dalam penyusunan APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025.
3. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD sampai semester pertama Tahun 2024 yang sudah mencapai 45,87 % serta perekonomian dan PDRB Perkapita masyarakat yang semakin meningkat, maka masih terdapat potensi untuk meningkatkan target penerimaan daerah yang akan ditampung dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Demikian beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Selanjutnya sesuai dengan agenda pokok Rapat Paripurna kita pada hari ini, kita berikan kesempatan kepada Saudara Gubernur untuk dapat menyampaikan Pengantarnya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pengantar Ranperda Perubahan APBD
Tahun 2024

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dari pengantar yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur, kita sudah dapat mengetahui rencana anggaran Pemerintah

Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, yang mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara umum, rencana anggaran tersebut, sudah sejalan dengan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terdapat dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang disepakati DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Rencana anggaran Pemerintah Daerah yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, perlu kita bahas dan dalam nanti dengan memperhatikan beberapa catatan yang kami kemukakan di atas.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangannya terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, baik dari sisi pendapatan

maupun sisi belanja dan dapat merumuskan pandangan, pendapat dan masukan-masukan yang komprehensif, agar Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat lebih akomodatif, efektif, efisien dan akuntabel dan dapat memutus mata rantai permasalahan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan agenda kegiatan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 1 Agustus 2024 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Pengantar Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan
" Alhamdulillahrabbi alamin " Rapat Paripurna dalam rangka
Penyampaian Pengantar Ranperda Perubahan APBD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024, kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb***



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

RABU, 31 JULI 2024

=====

ASSALAMUALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

**YTH. SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT.**

**YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
KEPALA OPD/ BIRO, DIREKTUR RSD, DAN
DIREKTUR BUMD LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN UNDANGAN,
HADIRIN HADIRAT YANG BERBAHAGIA**

ALHAMDULILLAH, SEGALA PUJI DAN SYUKUR
SENANTIASA KITA SAMPAIKAN KEHADIRAT ALLAH
SWT, ATAS RAHMAT, HIDAYAH DAN KARUNIA-NYA
KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA
DAPAT HADIR DAN MELAKSANAKAN RAPAT
PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2024.

SHALAWAT BERIRING SALAM MARILAH KITA
PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI
BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH
MEMBERIKAN TUNTUNAN BAGI UMAT MANUSIA
UNTUK KESELAMATAN KEHIDUPAN BAIK DI DUNIA
MAUPUN DI AKHIRAT.

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN
YANG TERHORMAT.**

DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN
APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2024, PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD TELAH MELAKSANAKAN PROSES DAN TAHAPAN SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DIMANA PADA TAHAPAN SEBELUMNYA TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN DAN MENYEPAKATI PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TERTUANG DALAM NOTA KESEPAKATAN NOMOR 120-155/GSB-2024 DAN NOMOR 120-8-2024 TANGGAL 27 JULI 2024 TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DAN NOTA KESEPAKATAN NOMOR 120-156/GSB-2024 DAN NOMOR 120-9-2024 TANGGAL 27 JULI 2024 TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

PADA TAHAPAN BERIKUTNYA BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN DAN

MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DIBAHAS DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN.

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TERSEBUT DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG SALAH SATUNYA ADALAH NOTA KEUANGAN. NOTA KEUANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 SECARA SUBSTANSI MEMUAT PENJELASAN ATAU GAMBARAN TENTANG KONDISI DAN PROYEKSI SERTA KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

SEBAGAIMANA PIDATO PENDAPAT AKHIR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP KUA-PPAS TAHUN 2025 DAN KUPA-PPAS TAHUN 2024 PROVINSI

SUMATERA BARAT SABTU, 27 JULI 2024, KITA SAMA-SAMA MENYADARI DAN MEMAHAMI BAHWA APBD TAHUN 2024 INI DIHADAPKAN KEPADA KONDISI YANG TIDAK MUDAH, HAMPIR SAMA DENGAN KONDISI TAHUN ANGGARAN 2023 YANG LALU. DI SATU SISI KITA MEMBUTUHKAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG CUKUP BESAR UNTUK MENDANAI PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENJADI PRIORITAS PADA APBD TAHUN 2024, DAN DI SISI YANG LAIN SECARA BERSAMAAN KITA JUGA MENGALAMI KETERBATASAN FISKAL UNTUK MENDANAI PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT SECARA OPTIMAL.

DI TENGAH KETERBATASAN TERSEBUT TENTU KITA TETAP BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK DAPAT MENGAKOMODIR KEWAJIBAN DAN PRIORITAS ANGGARAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 INI. PEMERINTAH PROVINSI HARUS BERUSAHA OPTIMAL AGAR SELURUH URUSAN PEMERINTAHAN BAIK URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR,

SAMPAI DENGAN URUSAN PILIHAN DAPAT DILAKSANAKAN SEOPTIMAL MUNGKIN.

GAMBARAN KONDISI DAN PROYEKSI YANG TERSAJI DALAM NOTA KEUANGAN INI SUDAH DIDASARKAN KEPADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD SERTA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA OLEH GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN DPRD PADA TANGGAL 27 JULI 2024 YANG LALU SEBAGAIMANA DIURAIKAN PADA BAB PER BAB PADA NOTA KEUANGAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

GAMBARAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, TOTAL PERUBAHAN APBD SEBESAR 7,057 TRILIUN RUPIAH MENGALAMI KENAIKAN 220,01 MILIAR RUPIAH DARI APBD AWAL SEBESAR SEBESAR 6,837 TRILIUN RUPIAH.

KAPASITAS FISKAL ATAU KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT MENGALAMI DEFISIT SEBESAR 160,447 MILIAR RUPIAH YANG MERUPAKAN SELISIH BELANJA DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH. DEFISIT TERSEBUT SESUAI KETENTUAN DITUTUPI DENGAN PEMBIAYAAN NETTO YANG MERUPAKAN SELISIH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN. PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERSUMBER DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR 180,447 MILIAR RUPIAH YANG MERUPAKAN HASIL AUDIT BPK RI ATAS LKPD TAHUN 2023.

JUMLAH SILPA SEBAGAIMANA DIMAKSUD, DIDALAMNYA TERDAPAT SILPA EARMARK YANG BERASAL DARI DANA DAK FISIK, DAK NON FISIK, SISA DANA BOS, SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA, DAN SISA BLUD. DISAMPING HAL TERSEBUT JUGA TERDAPAT KEGIATAN TAHUN 2023 YANG PENYELESAINNYA LEWAT TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN 2024,

UTANG BELANJA/ PEKERJAAN YANG HARUS DIBAYARKAN PADA TAHUN 2024, PEKERJAAN YANG SUDAH ADA BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) TETAPI BELUM DIBAYARKAN PADA TAHUN 2023 SERTA UTANG BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG HARUS DIBAYARKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.

**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN
YANG TERHORMAT.**

BERDASARKAN PERUBAHAN KUA-PPAS YANG TELAH DISEPAKATI, RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 SECARA UMUM MELIPUTI TOTAL PENDAPATAN DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR 6,877 TRILIUN RUPIAH, BELANJA DAERAH SEBESAR 7,037 TRILIUN RUPIAH, DEFISIT SEBESAR 160,447 MILIAR RUPIAH, DIMANA NILAI DEFISIT TERSEBUT DITUTUPI SEPENUHNYA DENGAN PEMBIAYAAN NETTO, YANG MERUPAKAN SELISIH ANTARA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN. KEBIJAKAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 DAPAT DIJELASKAN
SEBAGAI BERIKUT:

A. PENDAPATAN DAERAH

PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2024 PENDAPATAN DAERAH DITARGETKAN
SEBESAR 6,877 TRILIUN RUPIAH ATAU MENGALAMI
PENINGKATAN SEBESAR 4,42% DARI APBD AWAL
SEBESAR 6,586 TRILIUN RUPIAH. SUMBER
PENDAPATAN TERSEBUT TERDIRI DARI :

- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DIRENCANAKAN SEBESAR 3,394 TRILIUN RUPIAH
NAIK SEBESAR 8,84% ATAU SEBESAR 275,778
MILIAR RUPIAH DARI TARGET APBD AWAL
SENILAI 3,118 TRILIUN RUPIAH.
- PENDAPATAN TRANSFER YANG DALAM APBD
2024 AWAL DITARGETKAN SEBESAR 3,451
TRILIUN RUPIAH, PADA PERUBAHAN APBD 2024
INI NAIK SEBESAR 0,07% ATAU SEBESAR 2,250

MILIAR RUPIAH SEHINGGA MENJADI 3,453 TRILIUN RUPIAH.

- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR 17,024 MILIAR RUPIAH PADA APBD AWAL DAN MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 75,46% ATAU NAIK SEBESAR 12,846 MILIAR RUPIAH MENJADI SEBESAR 29,870 MILIAR RUPIAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD.

B. BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DIRENCANAKAN SEBESAR 7,037 TRILIUN RUPIAH. MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 219,878 MILIAR RUPIAH ATAU NAIK SEBESAR 3,22% DARI BELANJA DAERAH PADA APBD AWAL SEBESAR 6,818 TRILIUN RUPIAH. TOTAL BELANJA TERSEBUT DAPAT DIRINCI MENURUT KELOMPOK BELANJA SEBAGAI BERIKUT:

1. BELANJA OPERASI, SEBESAR 4,726 TRILIUN RUPIAH, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 0,86% DARI ANGGARAN YANG DITETAPKAN PADA APBD AWAL SEBESAR 4,686 TRILIUN RUPIAH
2. BELANJA MODAL PADA PERUBAHAN APBD DIRENCANAKAN SEBESAR 863,499 MILIAR RUPIAH, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 10,31% ATAU SEBESAR 80,706 MILIAR RUPIAH DARI ANGGARAN PADA APBD AWAL SEBESAR 782,783 MILIAR RUPIAH.
3. BELANJA TIDAK TERDUGA DIRENCANAKAN SEBESAR 29,333 MILIAR RUPIAH, TURUN SEKITAR 37,61% ATAU SEBESAR 17,609 MILIAR RUPIAH DARI YANG DIANGGARKAN PADA APBD AWAL SEBESAR 46,942 MILIAR RUPIAH.
4. BELANJA TRANSFER DIRENCANAKAN SEBESAR 1,418 TRILIUN RUPIAH, NAIK 8,95% ATAU SEBESAR 116,466 MILIAR RUPIAH DARI APBD AWAL SEBESAR 1,301 TRILIUN RUPIAH.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024, PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DIALOKASIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN LALU, ATAU TAHUN 2023, SEBESAR 180,447 MILIAR RUPIAH, SESUAI DENGAN AUDIT BPK RI ATAS LKPD TAHUN 2023, SEHINGGA TERJADI PENURUNAN SEBESAR 70,996 MILIAR RUPIAH ATAU TURUN SEBESAR 28,24% DARI APBD AWAL SEBESAR 251,444 MILIAR RUPIAH.

UNTUK PENJELASAN LEBIH LENGKAP DAN TERPERINCI DAPAT DIBACA PADA DOKUMEN NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA LAMPIRANNYA YANG SEBELUMNYA TELAH DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA DPRD.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN
YANG TERHORMAT.

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK SELANJUTNYA DAPAT DIBAHAS SECARA BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD, DENGAN HARAPAN DAPAT KITA SEPAKATI SEBELUM BATAS WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

AKHIRNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI TINGGINYA ATAS TERJALINNYA KERJASAMA YANG BAIK SELAMA INI. SEMOGA NIAT IKHLAS DAN IKHTIAR KITA INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG LEBIH BESAR BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT, SERTA MEMPEROLEH RIDHA DAN BERKAH HENDAKNYA DARI ALLAH SWT. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

WA BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH, WALLAHU
MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIK, FASTABIKHUL
KHAIRAT.

WASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA
BARAKATUHU.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI